

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman saat ini, teknologi telah dianggap menjadi kebutuhan penting di seluruh lapisan masyarakat dunia. Di era globalisasi saat ini hampir segala aspek didukung oleh kecanggihan teknologi yang berkembang sangat pesat, dimulai dari pemenuhan kebutuhan primer hingga penggunaan teknologi untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah satu perkembangan zaman saat ini ditandai dengan adanya sistem pembayaran non tunai atau *cashless*¹¹ dengan alasan kecepatan dan keamanan dalam bertransaksi. Selain itu, teknologi informasi merupakan tanda bahwa di era perkembangan zaman saat ini sangatlah dibutuhkan karena dapat memajukan dan memperluas jaringan. Termasuk juga *smart card*. *Smart card* merupakan sebuah kartu yang di dalamnya mengandung sebuah *microprocessor* dan sebuah chip memori atau mengandung sebuah chip memori yang tidak dapat diprogram secara *logical*. Selama ini teknologi kartu yang kita kenal berkisar pada aplikasi di mesin ATM, kartu kredit, kartu GSM, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk menunjang segala jenis kebutuhan manusia.²



Smart card di Indonesia berkembang diawali dengan adanya sim card *handphone*, kartu akses, kartu kredit, serta kartu yang digunakan sebagai pembayaran transportasi umum. Maraknya penggunaan *smart card* di Indonesia terjadi ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan BPPT serta badan dan industri lain mengubah KTP yang selama ini hanya berupa kartu biasa menjadi kartu elektronik yang dilengkapi kartu. dengan chip yang mampu menyimpan informasi data pemegang kartu

¹ Rahayu Setiani, "Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai (Studi di Kota Purbalingga) Skripsi Oleh : Nama : Rahayu Setiani Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta," 2018.

² Diah Lina Setyawati, "Quality of Jakarta Smart Card Services in East Jakarta", *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol 4 No 1 (2021).

yang disebut juga dengan e-KTP. Penggunaan kartu pintar lainnya secara masif terjadi di sektor transportasi. Penggunaan awal oleh Jasa Marga pada tahun 2009 adalah dalam bentuk e-Toll.³

Perkembangan *smart card* telah memberi dampak pada berbagai bidang dan berbagai jenis kebutuhan dapat diakses menggunakan *smart card* baik di bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang jasa, bidang pendidikan dan sebagainya. Tak terkecuali dalam bidang sistem pembayaran, khususnya alat elektronik yang merupakan alat pembayaran nontunai dengan menggunakan *smart card*. Penggunaan *smart card* akan berpotensi mengurangi penggunaan uang tunai di masa mendatang dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Inovasi keuangan digital berupa aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital penyelesaian transaksi penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran, perasuransian, pendukung pasar, dengan syarat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.⁴

Tingkat kemajuan teknologi merupakan hal besar yang harus terus dikembangkan guna terus memajukan pertumbuhan ekonomi terlebih dalam perkembangan ekonomi

³ Onny Rafizan, "Studi Perkembangan Pasar Smart Card Indonesia Pada Sektor Perbankan", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* Volume: 8 No. 1 (Januari - September 2017) Hal.:47-58. Doi [10.17933/mti.v8i1.102](https://doi.org/10.17933/mti.v8i1.102)

⁴ Kominfo, "Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Persyaratan Teknis Pembaca Kartu Cerdas" dalam https://m.kominfo.go.id/content/detail/4056/siaran-pers-no39pihkominfo72014-tentang-konsultasi-publik-rancangan-peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-mengenai-persyaratan-teknis-pembaca-kartu-cerdas-nirkontak-icontactless-smart-card-readeri/0/siaran_pers diakses pada 28 desember 2022.

syariah dimana aset keuangan syariah global telah mencapai US\$3,37 triliun pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat 13,8% dari tahun sebelumnya yaitu US\$2,96 triliun, menandakan tetap tumbuhnya industri keuangan syariah global meskipun dihantam oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sementara di Indonesia data menunjukkan selama tahun 2021, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp 2.050,44 triliun atau tumbuh 13,82 persen secara *year on year*. dengan banyaknya asset tersebut tentu akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.⁵

Indonesia yang merupakan negara pemeluk agama Islam terbesar di dunia memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan keuangan syariah secara global dengan sumber daya alam yang melimpah juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang unggul dalam meningkatkan perkembangan ekonomi syariah Indonesia memiliki beberapa sektor yang dapat dijadikan sebagai komponen pertumbuhan ekonomi syariah salah satunya yakni pesantren dimana berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) mencatat, jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 26.975 unit hingga April 2022 dengan jumlah santri mencapai terdapat 1,64 juta santri di pondok pesantren seluruh Indonesia per September 2022.⁶ Hal ini tentu mampu mendukung pemerintah dalam meningkatkan perekonomian melalui pesantren dan pemerintah terus melakukan upaya peningkatan ekonomi termasuk juga dalam upaya pengembangan kemandirian ekonomi pesantren yang memiliki peran sangat penting untuk membangun basis ekonomi nasional yang kuat.

Dalam mendorong terciptanya peningkatan perekonomian di Indonesia melalui pesantren terdapat tiga prasyarat kemajuan bisnis ekonomi dan keuangan pesantren dengan pendekatan manajemen ekonomi dan bisnis modern. Pertama, keuletan dan daya

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021” dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2021.aspx> diakses pada 7 Januari 2023.

⁶ Kementerian Agama RI, “Statistik Data Pondok Pesantren” dalam <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> diakses pada 7 Januari 2023.

tahan. Kedua, memperkuat jejaring/silaturahmi bisnis. Ketiga, memperkuat pengetahuan dan pemberdayaan ekonomi pesantren melalui ekosistem rantai nilai halal. Pengembangan kemandirian ekonomi pesantren menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. BI telah menyertakan peran pesantren dalam salah satu pilar cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yaitu penguatan ekonomi syariah melalui program peningkatan kelembagaan yang salah satunya melalui kemandirian ekonomi pesantren. Program pengembangan kemandirian pesantren diharapkan dapat mendorong pesantren sebagai penggerak utama dalam ekosistem rantai nilai halal. Selain itu, sinergi dan *linkage* dengan UMKM dan korporasi juga perlu terus dilakukan untuk semakin memperkuat peran pesantren dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal.

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah melakukan banyak sekali kebijakan untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi salah satunya yakni kemandirian ekonomi pesantren melalui kemajuan teknologi digital turut juga mempengaruhi bagaimana meningkatkan literasi digital agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dimana kehidupan pesantren semakin berperan penting. Sudah saatnya literasi digital menjadi jembatan antara dakwah dan dampak ekonomi yang ditransmisikan ke masyarakat. Lulusan pesantren selain mampu berdakwah juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Salah satu mata pelajaran atau keterampilan yang harus dibina di lingkungan pesantren adalah yang berkaitan dengan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan bekal bagi mahasiswa ketika terjun ke masyarakat. Berpartisipasi dalam inovasi dan penciptaan ide bisnis kreatif yang dapat berkontribusi pada ketersediaan lapangan kerja di masyarakat. Usaha para santri harus mengalami langsung praktik kewirausahaan sejak berada di lingkungan pesantren. Banyak sektor yang bisa dikembangkan, mulai dari industri kreatif, seperti desain,



fotografi, tekstil, memasak, hingga aplikasi. Sebuah pesantren setidaknya memiliki tiga potensi dalam hal kemandirian ekonomi, yaitu potensi santri, potensi masyarakat seluruh pesantren, dan potensi zakat dan wakaf umat. Dengan potensi yang dimilikinya, lembaga pendidikan agama tersebut dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan membangun bangsa. Pemaksimalan potensi tersebut akan membuat pesantren dapat mencapai kemandirian usaha sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pondok pesantren mandiri setidaknya mempunyai bisnis yang profesional untuk menunjang operasional pondok pesantren dan unit belajar mengajar yang terfokus dan sistematis, sehingga dampak kehadiran pondok pesantren yang lebih luas dapat menjadi bagian dari solusi. mengurangi kemiskinan dan pengangguran untuk kepentingan masyarakat.⁷



Upaya untuk terus menciptakan pertumbuhan kemandirian ekonomi yang baik melalui pesantren telah marak digalakan kemandirian ekonomi pesantren menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif salah satunya terdapat di Pondok Pesantren Al-Amin yang beralamatkan di kecamatan Soko kabupaten Mojokerto yang memiliki kurang lebih 500 santri dan 100 pengurus maupun asatidz. Pondok Pesantren Al-Amin selain tempat untuk menimba ilmu pegetahuan juga diajarkan bagaimana santri bisa berwirausaha dengan baik dalam pengimplementasiannya menerapkan jiwa wirausaha dan kemajuan teknologi dengan melakukan inovasi untuk menunjang kebutuhan santri dan memberikan suatu metode wirausaha santri yang berbasis teknologi dan *entrepreneur* yang mampu diterapkan dalam kehidupan para santrinya mendirikan swalayan mini untuk memenuhi kebutuhan para santri dan pengurus Pondok yang bernama Al-Aminmart, dibawah kendali Koperasi Pesantren Al-Amin. Dalam Al- Al-Aminmart santri diajarkan untuk

⁷ Kementerian Agama RI, “Statistik Data Pondok Pesantren” dalam <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> diakses pada 7 Januari 2023

berproses melakukan transaksi menjual produk dan sebagainya dimana keuntungan dari Al-Aminmart nantinya akan kembali pada santri untuk menunjang kebutuhan pesantren. Dalam hal pembayaran Pesantren Al-Amin menggunakan *smart card* khusus yang bisa digunakan oleh para santri untuk melakukan transaksi dalam segala hal baik untuk memenuhi kebutuhan maupun pembayaran SPP.

Pesantren Al-Amin juga memiliki beberapa usaha yang dikelola santri antara lain produksi minuman air isi ulang galon yang diperjual belikan juga memiliki lapangan futsal berstandar nasional yang disewakan untuk umum serta pada santri putri dilatih untuk menjahit dan membuat bros hijab. Hal tersebut dilakukan untuk menambah wawasan para santri agar dapat berwirausaha saat telah lulus dari pondok pesantren. Dari ribuan santri yang lulus beberapa alumni yang tergabung dalam organisasi Fosil Alam (forum silaturahmi alumni Al Amin) beberapa memiliki usaha seperti café, percetakan, pertanian dan lain sebagainya. Sementara itu Pesantren Al-Amin juga memiliki lahan seluas kurang lebih 100 meter persegi yang digunakan untuk penanaman buah dan sayur yang dikelola oleh organisasi pramuka dimana hasilnya dinikmati bersama oleh para santri hal tersebut merupakan upaya upaya pembelajaran yang ada di Pesantren Al-Amin sooko Mojokerto.



Penggunaan sistem pembayaran non tunai oleh santri dan pengurus Pondok Pesantren Al-Amin di Al-Aminmart menjadi solusi terbaik ketika di kalangan para santri sering terjadi kehilangan uang tunai dan batas besaran nominal uang tunai yang dibawa oleh santri. Dengan itu, Pondok Pesantren Al-Amin menerapkan peraturan tentang beralihnya pembayaran tunai menjadi non tunai. Bentuk alat dari pembayaran non tunai di Al-Aminmart yakni dengan menggunakan *Smartcard* sebagai pengganti istilah lain dari *e-money*. Hadirnya *smartcard* ini disambut dengan baik oleh para santri dan pengurus Pondok Pesantren Al-Amin karena inovasi baru tersebut memberikan manfaat

keamanan dan kenyamanan saat bertransaksi di Al-Aminmart. Dalam kajian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa arah pengembangan dan perkembangan ekonomi digital perlu dimulai dengan mengembangkan e-agrologistik dan layanan keuangan digital inklusif melalui optimalisasi *nerve center* di dalam negeri. Proses pengembangan ini harus juga dilandasi dengan mendorong lahirnya platform dan kreator produk digital yang dikelola oleh *e-commerce* dengan basis regional. Perkembangan teknologi digital yang semakin meluas di Indonesia diperkirakan akan semakin mendorong perkembangan ekonomi digital. Pengembangan ekonomi digital berdasarkan pengalaman perkembangan dan pengembangan pelayanan pembiayaan berbasis digital diperkirakan tidak mudah dilakukan. Tren perkembangan ekonomi digital sangat dinamis tergantung dari perkembangan teknologi yang begitu cepat berkembang.⁸

Dalam hal ini Pondok Pesantren Al-Amin menggunakan sistem yang mampu beradaptasi dengan teknologi masa kini. Dimana para santri mempunyai kartu tanda santri dalam bentuk *smartcard* yang bisa digunakan sebagai alat transaksi di lingkungan pondok pesantren, tak hanya itu dalam upaya peningkatan kualitas ekonomi digital juga ditunjang dengan inovasi dengan program *e-buy* transaksi via online juga dalam proses pembelajaran ada inovasi teknologi berupa Al-Amin digital *learning system* sebagai media pembelajaran, perpustakaan dan sistem informasi manajemen sehingga mampu mendidik para santri untuk terus berkembang dikemajuan teknologi masa depan.



Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk memahami peran Pesantren Al-Amin dalam upaya menuju pondok pesantren yang mandiri melalui kemajuan teknologi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Analisis Kemandirian Ekonomi Pesantren Melalui Inovasi Digitalisasi *Smart Card* (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amin Sooko Mojokerto).

⁸ Kementerian Komunikasi dan Informasi, "Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial," 2019, 1–68.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kemandirian ekonomi pesantren di pesantren Al-Amin Sooko Mojokerto?
2. Bagaimana kemandirian ekonomi pesantren melalui inovasi digitalisasi *smart card* di Pondok Pesantren Al-Amin Sooko Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ada sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa bentuk-bentuk kemandirian ekonomi di Pesantren Al-Amin Sooko Mojokerto
2. Untuk menganalisa kemandirian ekonomi pesantren melalui inovasi digitalisasi *smart card* di Pondok Pesantren Al-Amin Sooko Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dilaksanakan agar dapat memperluas ilmu pengetahuan yang bisa mengembangkan cara berfikir dan menambah wawasan terkait dengan kemandirian ekonomi pesantren melalui inovasi digitalisasi *smart card*.

2. Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang bentuk bentuk kemandirian ekonomi dan inovasi digitalisasi sistem pembayaran.

- b. Bagi peneliti selanjutnya



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk bentuk kemandirian ekonomi dan inovasi digitalisasi sistem pembayaran.

c. Bagi pondok pesantren

Sebagai sarana pertimbangan untuk dapat meningkatkan perkembangan pondok pesantren terutama dalam bidang ekonomi dan inovasi digitalisasi pembayaran.

